BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pertanggungjawaban hukum dalam menjamin kualitas pelayanan di Puskesmas Air Santok Kota Pariaman dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban hukum dalam menjamin kualitas pelayanan di Puskesmas Air Santok Kota Pariaman memiliki tanggung jawab hukum. Sebagai penyedia layanan kesehatan tingkat pertama, Puskesmas Air Santok Kota Pariaman memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin hak-hak pasien, termasuk hak atas informasi kesehatan, pelayanan yang bermutu, privasi medis, serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis. Berbagai regulasi telah diterapkan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. yang mengacu pada berbagai regulasi, seperti PMK 43 Tahun 2019, PMK 19 Tahun 2024, serta KMK 2015 Tahun 2023. Sebagai puskesmas dengan akreditasi paripurna, Puskesmas Air Santok telah berupaya menjalankan sistem pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk sistem akreditasi, monitoring kualitas pelayanan, serta mekanisme pengaduan bagi masyarakat.
2. Kendala dalam menjamin kualitas pelayanan di Puskesmas Air Santok Kota Pariaman masih terdapat beberapa kendala yang, seperti keterbatasan fasilitas medis, belum tersedianya ruang bersalin dan

IGD 24 jam, serta kendala dalam sistem administrasi yang masih memerlukan input data ke berbagai sistem yang berbeda. Selain itu, rendahnya kepesertaan BPJS di wilayah kerja puskesmas juga menjadi tantangan dalam menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan.

3. Upaya hukum dalam menjamin kualitas pelayanan di Puskesmas Air Santok Kota Pariaman terdapat berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pengajuan pembangunan ruang bersalin dan IGD 24 jam, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait integrasi sistem pencatatan data, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya layanan kesehatan di puskesmas. Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, diharapkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Air Santok dapat terus meningkat dan semakin optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam peningkatan fasilitas pelayanan pemerintah daerah dan pihak terkait perlu mendukung pembangunan fasilitas tambahan seperti mempercepat pembangunan ruang bersalin dan IGD 24 jam di Puskesmas Air Santok agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih optimal, terutama dalam kondisi darurat serta dapat mencakup kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Selain itu, peningkatan jumlah alat kesehatan dan tenaga

medis juga perlu dipertimbangkan guna menjamin pelayanan yang lebih maksimal.

2. Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan diharapkan dapat mempercepat penerapan sistem integrasi pencatatan data kesehatan yang menghubungkan BPJS, e-Puskesmas, dan Kemenkes agar tenaga medis tidak terbebani dengan input data yang berulang dan dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dengan sistem yang lebih efisien dan terpusat, tenaga medis dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada pasien, serta meminimalkan kesalahan administratif yang dapat berdampak pada kualitas layanan Kesehatan yang diberikan.
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya layanan kesehatan di puskesmas, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang prosedur administrasi yang benar, manfaat kepesertaan BPJS, serta pentingnya mengikuti aturan dalam pelayanan kesehatan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan jumlah peserta BPJS meningkat serta kepatuhan terhadap prosedur layanan kesehatan semakin baik dan agar lebih banyak warga yang terdaftar dan dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Bari Syaifudin, 2002, *Buku acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta.
- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Amir Amri, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Widya Medika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Azrul Anwar, 1996, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Edisi Ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Endang Wahyati Yustina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, CV Keni Media, Bandung.
- Guwandi, 2004, *Hukum Medical*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Nasrul Effendy, 1998, *Dasar dasar keperawatan kesehatan*, Edisi 2, EGC, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1990, *Segi-segi Hukum Hak dan kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sri Siswati, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Suherman, 1979, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung.

Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Sulawesi Selatan.

Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

W. J. S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

C. Sumber Lain

Habibi, 2019, *Tanggung Jawab Puskesmas Dalam Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Pesantren Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Skabies di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)*, *AKTUALITA*, Vol.2 No.2.

I Gusti Ayu Ari Agung, 2021, *Hukum Kesehatan*, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar.

Moh Syaeful Bahar, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha*, *Jurnal Legisla*, Volume 14 Nomor 2.

Nur Dwi Jayanti dan Sutriyari Purwanti, 2017, *Kualitas Pelayanan (Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, Tangibles) Di Legend Premium Coffee Yogyakarta*, *Jurnal Pendidikan Teknik Boga*, Yogyakarta.

Rizky Novianti, Nayla Alawiya, dan Nurani Ajeng Tri Utami, "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Kejadian Sentinel Dalam Pelayanan Kesehatan," *SLR* 3, no. 4

Wilhamda. 2011. *Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan*. Medan. Program Studi Diploma III Keperawatan Haji Medan.